

Kesiapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah Untuk Menunjang Kinerja

Nur Anisah^{1*}, Lilik Pujiati²
STIE PGRI Dewantara Jombang
*Korespondensi: nur.anisah.stie.dw@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan UMKM dalam penerapan Laporan Keuangan UMKM di Jombang dan kendala-kendala yang dihadapi serta perannya dalam menunjang kinerja UMKM. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara serta pengamatan langsung terhadap obyek penelitian pada 16 UMKM Unggulan di Jombang. Hasil penelitian menunjukkan ketidaksiapan pelaku UMKM dalam menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Kendala yang dialami oleh pelaku UMKM dalam pencatatan akuntansi dan pembuatan laporan keuangan adalah tidak memiliki sumberdaya khusus yang menangani pencatatan akuntansi dan laporan keuangan, sedangkan pengelolaan usahanya dilakukan oleh pemilik yang tidak memahami tentang akuntansi dan laporan keuangan. Sebagian diantara pelaku UMKM juga menganggap bahwa laporan keuangan tidak terlalu dibutuhkan karena dana yang dikelola adalah dana pribadi yang tidak dipertanggungjawabkan pada pihak lain. Beberapa pelaku UMKM mengakui bahwa sebenarnya pencatatan akuntansi maupun laporan keuangan bermanfaat untuk menunjang kinerja usahanya, namun karena kendala yang ada, mereka belum siap menerapkan SAK EMKM pada usaha mereka meskipun beberapa diantaranya pernah memperoleh pelatihan akuntansi.

Kata kunci : Kinerja, SAK EMKM, UMKM

Abstract

This study aims to determine the readiness of Micro, Small and Medium Enterprise (UMKMs) in the application of Micro, Small and Medium Entity (EMKM) Financial Reports in Jombang and the obstacles faced and their role in supporting the performance of MSMEs. Qualitative descriptive research method by collecting data through interview techniques and direct observation of the object of research on 16 leading MSMEs in Jombang. The results of the study show the unpreparedness of UMKMs actors in applying financial reports that are in accordance with the SAK EMKM. Constraints experienced by UMKM actors in accounting records and financial report making are not having special resources that handle accounting records and financial statements, while the management of their business is carried out by owners who do not understand accounting and financial statements. Some of the UMKM actors also consider that financial reports are not really needed because the managed funds are personal funds that are not accountable to other parties. Some MSMEs admitted that accounting records and financial statements were actually useful to support their business performance, but due to constraints, they were not ready to implement EMKM IFRSs in their businesses even though some had received accounting training.

Keywords: Performance, SAK EMKM, MSMEs

A. PENDAHULUAN

Terdapat beberapa masalah yang seringkali terabaikan dari para pelaku bisnis UMKM yaitu mengenai pengelolaan keuangan. Dampak dari pengabaian pengelolaan keuangan mungkin tidak terlihat secara jelas, namun tanpa metode akuntansi yang efektif, usaha yang memiliki prospek untuk berhasil dapat menjadi bangkrut (Ediraras, 2010). Didalam sebuah UMKM laporan keuangan sangatlah penting untuk melihat siklus perkembangan usaha seperti halnya dalam pengambilan keputusan, dan apabila seorang investor ingin membantu UMKM yang telah memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standart akuntansi yang ada maka investor tersebut akan berkenan membantu masalah yang ada didalam UMKM tersebut.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Kontribusi besar UMKM

mencakup terciptanya lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan terutama menjadi penghalang saat terjadinya tekanan krisis ekonomi. Melihat peran penting tersebut, membutuhkan dorongan kepada pelaku UMKM untuk memajukan dan menjadikan UMKM yang lebih berkembang, mandiri, dan modern, tersebut memiliki akses pendanaan yang semakin luas ke sektor perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didalam pasal 3 dinyatakan bahwa pelaku UMKM bertujuan meningkatkan dan memajukan usahanya dalam rencana pembangunan perekonomian nasional berdasarkan ekonomi yang berkeadilan.

Dengan disahkannya SAK EMKM ini, maka standar akuntansi keuangan di Indonesia nantinya untuk menjadi sempurna dengan tiga pilar standar akuntansi keuangan, merupakan SAK Umum yang berbasis IFRS, SAK ETAP, dan SAK EMKM. Masing-masing pilar utama tersebut merupakan dukungan infrastruktur dalam konteks standar akuntansi keuangan yang dapat mencerminkan esensi dari entitas dunia usaha di Indonesia, yaitu: a) SAK Umum yang berbasis IFRS merupakan standar akuntansi keuangan yang mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas dengan akuntabilitas publik signifikan; b) SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuangan yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan namun menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaannya; c) SAK EMKM yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM ini diharapkan dapat membantu sekitar 57,9 juta pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi keuangan yang ada saat ini. SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan SAK ETAP. Misalnya, dari sisi teknikal, SAK EMKM murni menggunakan dasar pengukuran biaya historis sehingga UMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya.

Menilai seberapa baik aktivitas dan proses yang dilakukan perusahaan merupakan hal yang mendasar dalam meningkatkan profitabilitas, sehingga untuk itu perlu digunakan ukuran kinerja yang dirancang untuk menilai seberapa baik hasil akhir yang dicapai. Dengan adanya pengukuran kinerja akan dapat dilakukan evaluasi terhadap perbandingan kinerja yang dijalankan dengan yang sesungguhnya. Dari hasil evaluasi tersebut, manajemen perusahaan dapat mengetahui seberapa besar penyimpangan yang terjadi dan seberapa jauh kemajuan yang telah sesuai dengan standart kinerja perusahaan, sehingga dapat mengambil sebuah keputusan untuk mengatasinya.

Untuk dapat meningkatkan kinerja UMKM di Kabupaten Jombang pada pertumbuhan ekonomi, dan adanya perubahan yaitu SAK EMKM dalam membantu pencatatan keuangan pelaku UMKM. Tentu saja perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh baik dari pelaku UMKM maupun dari pihak yang terkait, terutama Dinas UMKM. Penelitian sebelumnya dilakukan pada salah satu UMKM di Pekanbaru oleh Neneng Salmiah, Indarti & Inova Fitri Siregar(2015) menunjukkan bahwa UKM mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangan dikarenakan minimnya pengetahuan, pemahaman serta kesadaran akan pentingnya penerapan akuntansi secara lengkap dan sesuai dengan SAK ETAP bagi pelaku UMKM terutama dalam proses penyusunan laporan keuangan dalam rangka memperoleh informasi tentang kegiatan usaha selama satu periode akuntansi.

B. LANDASAN TEORI

1. Definisi Kesiapan

Dian dalam Azwan (2015:18) mendefinisikan kesiapan (*readiness*) sebagai penanda kognitif terhadap perilaku dari penolakan atau dukungan terhadap upaya perubahan.

Sedangkan definisi kesiapan untuk berubah adalah sikap komprehensif yang memengaruhi secara berkelanjutan oleh isi (contoh: apa yang sedang berubah), proses (contoh: bagaimana perubahan diimplementasikan), konteks (contoh: keadaan yang berada pada saat perubahan terjadi), dan individu (contoh: karakteristik dari mereka yang diminta untuk berubah) melibatkan dan secara kolektif merefleksikan keluasan terhadap individu atau sekumpulan individu sebagai kenaikan secara kognitif dan secara emosional untuk menerima, menyetujui, dan mengadopsi sebuah rencana khusus yang bermaksud untuk mengubah *status quo*.

2. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Menurut Dian, dalam Hasibuan (2003:3), sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Menurut Dian dalam Azwan (2015:19), dari segi kesiapan SDM terdapat beberapa indikator yang harus dipertimbangkan baik dari segi internal maupun eksternal. Dari segi internal adalah sebagai berikut: a) Integritas adalah suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang; b) Kompetensi berarti pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut para jabatan tertentu. Kompetensi dimaknai sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak; c) Loyalitas ialah mengikuti dengan patuh dan setia terhadap seseorang atau sistem/peraturan. Istilah loyalitas ini sering didefinisikan bahwa seseorang akan disebut loyal atau memiliki loyalitas yang tinggi jika ingin mengikuti apa yang dianjurkan atau yang telah menjadi kesepakatan bersama.

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK EMKM (2016) merupakan standar akuntansi yang berdiri sendiri yang dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana dalam SAK ETAP definisi dan karakteristik dalam Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas lainnya. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam SAK EMKM (2016) Laporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah terdiri dari : Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan

4. Kinerja UMKM

Kinerja perusahaan pada hakekatnya merupakan prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi bisnis yang dapat dilihat dari hasilnya (Hartini, 2012). Dalam artikel Rokhayati (2011:95) Pengukuran yang tepat terhadap kinerja UKM belum ada kesepakatan dan

JAD: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara

Vol. 1 No. 2, Desember 2018

<https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view>

umumnya peneliti-peneliti terdahulu memfokuskan pada variabel dimana informasi tersebut mudah diperoleh Untuk mengantisipasi tidak tersedianya data kinerja bisnis secara obyektif dalam sebuah penelitian khususnya UMKM, dimungkinkan untuk menggunakan ukuran kinerja secara subyektif, yang didasarkan pada persepsi manajer/pemilik.

C. METODE PENELITIAN

Dilihat dari latar belakang dan kajian pustaka yang diperoleh, maka penelitian yang akan digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Rancangan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan dapat menganalisis dan mengkaji segala temuan yang ada pada saat penelitian dilaksanakan. Obyek penelitian ini dilakukan pada 16 UMKM Unggulan di Kabupaten Jombang.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari keenambelas UMKM tersebut, sebagian besar termasuk kategori usaha kecil yaitu omset usaha antara 50.000.000 – 500.000.000 dan asetnya berada pada 300.000.000 – 12.500.000.000. Dari 16 UMKM hanya 6 UMKM yang melakukan pencatatan sederhana dan 10 UMKM tidak melakukan pencatatan. Sedangkan untuk pengetahuan dan pemberlakuan tentang SAK EMKM tidak ada yang memahami sama sekali.

1. Pencatatan Transaksi dan Laporan Keuangan

Pencatatan transaksi dalam akuntansi dimulai dari pembuatan jurnal dengan bukti transaksi, posting ke buku besar, pembuatan neraca lajur sampai pembuatan laporan keuangan. Kondisi dan hasil usaha suatu entitas dapat dilihat dari laporan keuangan yang dibuat oleh entitas tersebut dalam suatu periode. Laporan keuangan merupakan bagian dari siklus akuntansi. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dengan tujuan agar informasi yang ada didalamnya dapat digunakan sebagai proses pengambilan keputusan yang sesuai dengan kondisi suatu entitas.

“Dulu pernah diajari anak membuat laporan keuangan, tapi *dospundi...ribet. Mboten nutut* tenaganya” kata Bu Nurul Aini pemilik Opak Jepit. Lain lagi dengan pemilik UD Yasli, “Saya tidak pernah disiplin untuk pencatatan akuntansi, pencatatan itu juga hanya sebatas penjualan saja. Sering kali dicatat tapi nanti akhirnya beberapa bulan jalan terus tidak sempat, lupa dan seperti itu lagi”. Sedangkan Pak Rozikin pemilik UD Nusantara yang jenis usahanya profil gypsum menyatakan bahwa usahanya tidak memerlukan pencatatan transaksi maupun pembuatan laporan keuangan karena usahanya dimiliki sendiri, dikelola sendiri dan tidak terikat oleh pihak lain.

Bapak Antok selaku saudara dari Bapak Nirwan Yusuf, Central of Bronzes tidak melakukan pencatatan akuntansi sama sekali. Bapak Antok mengemukakan sebagai berikut: “Disini tidak ada pencatatan akuntansi mbak. Usaha ini kan sudah lama, sudah turun temurun sejak tahun 70-an dan dari dulu sampai sekarang juga gak pernah dibuat pencatatan akuntansi. Kami cuma mengumpulkan nota-nota seperti pembelian material, penjualan, mencatat pembayaran gaji gitu aja mbak, kalo proses pembukuan yang bener seperti orang akuntansi ya kami gak buat. Laporan keuangan juga tidak pernah buat karena tidak tau juga bagaimana laporan keuangan yang bener, taunya ya uang masuk berapa, uang keluar berapa baru ketemu sisanya. Tapi itu ya gak bisa pasti kan kita gunakan juga buat kebutuhan sehari-hari, campur lah mbak uang keluar buat kebutuhan produksi sama kebutuhan hidup”.

Hal yang sama juga dilakukan dengan UD Wisnu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, UD Whisnu juga sama sekali tidak membuat pencatatan akuntansi. Ibu Sri Lestari selaku pemilik UD Whisnu mengungkapkan sebagai berikut:

“Tidak ada pencatatan sama sekali mbak disini. Kalau mau tanya pencatatan akuntansinya seperti apa disini, ya gak ada yang bisa saya bantu karena memang disini tidak membuat seperti itu. Yang jelas ada ya pembayaran gaji mbak, karena sistemnya saya transfer jadi kan jelas ada buktinya, kalau lain-lain tidak ada, apalagi laporan keuangan, tidak pernah membuat”.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Sutoyo yang merupakan pemilik dari UD Gajah Mada. Beliau menuturkan sebagai berikut:

“Disini tidak ada pencatatan akuntansi. Laporan keuangan juga tidak membuat. Pembayaran gaji juga setiap sabtu dan tidak ada slip gaji. Kalau penjualan dan pembelian material ya ada nota tapi nota penjualan yang paling lengkap, itu saja yang ada. Pembukuan laporan keuangan yang benar terus terang saja tidak bisa membuatnya”.

Begitu pula yang diungkapkan oleh Bapak Salim pemilik Shiwa of Bronzes, seperti berikut ini:

“Nggak ada pencatatan akuntansinya disini, laporan keuangan juga nggak pernah buat. Yang ada ya nota penjualan, pembelian dan gaji. Kalau yang penjualan ini lengkap dari tahun ke tahun masih ada saya simpan soalnya itu penting buat mengetahui pembayaran customer yang masih nunggu, ya masih ada utang di saya gitu. Pembelian material juga lengkap soalnya saya juga kalau minta material nggak langsung bayar satu minggu atau satu bulan baru bayar. Ya sekedar itu saja yang ada, kalau pembukuan yang menurut ilmu akuntansi gitu nggak ada”.

Melihat hasil penelitian bahwa tidak ada satupun yang melakukan pencatatan akuntansi, maka bagaimana bisa mereka mengetahui laba bersih yang diperoleh setiap tahunnya dan bagaimana pula para pelaku UMKM menilai perkembangan atau keberhasilan usaha yang selama ini mereka tekuni tanpa adanya pencatatan akuntansi atau laporan keuangan. Mengenai hal tersebut Bapak Antok mengemukakan sebagai berikut:

“Kita memang tidak bisa mengetahui berapa laba bersih tiap tahun atau tiap bulannya, tapi ya kita bisa mengestimasi dari berapa jumlah pesanan yang diterima. Kalo pesanan banyak ya hasilnya juga banyak, bisa buat kehidupan sehari – hari dan kebutuhan lain juga. Sebenarnya penting ada laporan keuangan karena bisa tau pastinya berapa untung, uang yang masuk dan keluar tapi ya gimana sudah biasa dengan estimasi dan alhamdulillah jalan usahanya. Usaha dikatakan berkembang ya dilihat dari orderan mbak, kalau dulu pasarnya sedikit, sekarang bisa sampai ke Eropa. Dalam setahun minimal ada dua turis yang datang kesini buat lihat-lihat dan order”.

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Bapak Salim sebagai berikut:

“Penting sekali adanya laporan keuangan karena kalau tidak ada laporan keuangan tidak bisa tahu berapa laba bersih yang kita dapat, seperti saya ini yang taunya hanya dari estimasi saja. Kalau perkembangan usaha ya dilihat dari banyaknya orderan yang didapat dan kemajuan, contohnya dari hasil usaha ini saya sudah bisa punya rumah sendiri pada tahun 2004, jadi ada tambahan asset”.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh ibu Sri Lestari bahwa laba bersih itu diketahui dari selisih antara harga jual dan harga pokok produk, berikut uraiannya:

“Adanya laporan keuangan itu penting sekali buat usaha biar jelas alur uang masuk dan keluar, laba bersih yang didapat, dan jumlah asset yang ada. Kalau saya melihat laba ya dari

harga, harga pokok berapa kemudian saya jual dengan harga berapa, nah selisihnya itu adalah keuntungan saya dan keberhasilan usaha itu dilihat dari orderan yang saya terima”.

Hampir sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sutoyo, yaitu sebagai berikut:

“Penting sekali membuat laporan karena berguna untuk mengetahui arus kas yang selama berjalannya usaha. Tanpa laporan keuangan, saya mengetahui laba bersih dari target omset per bulan misalnya Rp 300.000.000 nah berarti laba yang saya dapat minimal 30% dari omset tadi. Kalau keberhasilan usaha ya tentu saja dilihat dari banyaknya orderan yang masuk”.

Pemilik Java Fiber Souvenir menyatakan bahwa tidak ada pembuatan laporan keuangan. Meskipun begitu, Java Fiber Souvenir masih melakukan pencatatan akuntansi sederhana sesuai dengan kebutuhan pemilik. “Kita nggak pernah sih membuat laporan keuangan masalahnya yang pegang saya sendiri dan pencatatan yang sudah saya lakukan juga sudah cukup mewakili bagi ukuran usaha saya ini, kan ya usaha saya tidak besar juga” (Natalia, pemilik Java Fiber Souvenir).

Dari 16 pelaku UMKM di Kabupaten Jombang hanya 6 UMKM yang melakukan pencatatan akuntansi. Mereka hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi tanpa melakukan pencatatan atas bukti-bukti transaksi yang telah dikumpulkan. Pemahaman mereka terkait akuntansi hanya sebatas berapa jumlah kas masuk dan kas keluar dalam suatu periode. Ada beberapa kendala yang membuat para pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan akuntansi dan menyusun sebuah laporan keuangan, diantaranya sebagai berikut: a) Latar belakang pendidikan. Para pelaku UMKM bukanlah orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sehingga mereka tidak memahami akuntansi secara mendalam; b) Sumber Daya Manusia. Mereka tidak memiliki SDM yang dapat membantu untuk membuat pencatatan akuntansi dan laporan keuangan karena pengelolaan dikendalikan penuh oleh pemilik UMKM sendiri; c) Pengguna informasi keuangan. Para pelaku UMKM tidak terikat dengan pihak ketiga manapun dan hanya menjalankan usahanya sendiri yang membuat ruang lingkup dari pengguna informasi keuangan hanya sebatas pemilik UMKM itu sendiri.

Pengetahuan UMKM tentang SAK EMKM

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan untuk UMKM dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Di dalam SAK EMKM penyusunan laporan dibuat lebih sederhana yang hanya mencakup tiga laporan keuangan yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu usaha. Beberapa hasil interview dengan pengelola UMKM :

“Mungkin saya mengerti, inget dikitlah seperti laba rugi pada saat kuliah dulu” (UD. Unggul Jaya Abadi).

“Saya sedikit mengetahui tentang standart akuntansi, tapi kalau yang terbaru atau yang disingkat seperti itu saya kurang paham” (UD. Putra Kembar). “Saya kurang tau kalau standar akuntansi dikalangan usaha seperti saya ini” (UD. Lima Saudara).

Bapak Antok yang merupakan perwakilan dari Central of Brozes. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Saya tidak tau kalau ada standar khusus untuk usaha-usaha seperti ini. Kalau jenis laporan keuangan yang sesuai dengan standar juga saya tidak mengetahui apa saja dan bagaimana bentuknya. Belum pernah ada sosialisasi terkait ini sebelumnya, biasanya yang ada itu cuma sosialisasi usaha, bagaimana cara mengelola modal dan bisa memasarkan produk seperti itu, itu pun sudah lama”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Salim. Bapak Salim tidak mengetahui bahwa ada SAK EMKM yang berlaku efektif per 1 Januari 2018 yang dipergunakan untuk UMKM. Beliau pun menuturkan bahwa laporan keuangan itu adalah laporan laba rugi. Beliau menuturkan sebagai berikut:

“Saya tidak tahu kalau ada standar baru buat usaha seperti ini yang berlaku 1 Januari 2018. Kalau ada sosialisasi seperti itu mungkin saya bisa tahu karena saya selalu menghadiri, ini tidak ada dan sekarang pun jarang ada seminar atau apa, kalau dulu sering ada sosialisasi usaha. Laporan keuangan sesuai standar itu yang seperti apa saya pun tidak begitu paham, yang saya tahu laporan itu ya laba rugi. Saya tahu laba rugi, masih ingat waktu sekolah dulu”.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Sri Lestari, yaitu sebagai berikut: “Tidak mengetahui ada standar itu dan bagaimana bentuk laporan keuangan yang sesuai standar juga saya tidak tahu. Tidak pernah ada pelatihan akuntansi disini, yang pernah saya ikuti dulu cuma seminar dari Dinas Perdagangan ya bagaimana mengelola usaha seperti itu”.

Faktor utama penyebab terbatasnya pengetahuan para pelaku UMKM tentang SAK EMKM yaitu tidak adanya sosialisasi mengenai SAK EMKM yang diberikan kepada para pelaku UMKM. Sosialisasi sangat dibutuhkan agar pelaku UMKM mengetahui bahwa ada standar yang mengatur tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan untuk UMKM. Dengan adanya sosialisasi para pelaku UMKM ini akan memahami bahwa ada standar yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan UMKM. Setelah diadakan sosialisasi, maka selanjutnya perlu diadakan pelatihan kepada para pelaku UMKM agar mereka juga mampu untuk menerapkan SAK EMKM.

2. Kesiapan UMKM dalam Penerapan SAK EMKM

Kesiapan SDM terdapat beberapa indikator yang harus dipertimbangkan baik dari segi internal maupun eksternal, misalnya dari segi internal dapat dilihat dari pengetahuan dan suatu tindakan seseorang untuk patuh terhadap peraturan, dan dari segi external seperti halnya motivasi yang dapat menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu untuk mengembangkan usahanya.

Kesiapan merupakan suatu kondisi yang menjadikan seseorang mampu untuk menghadapi perubahan yang ada. Kesiapan dalam mengimplementasi SAK EMKM dapat dilihat dari kondisi riil yang terjadi di UMKM. UMKM dapat dikatakan siap menerapkan SAK EMKM jika mereka sudah mampu membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Peneliti menganalisis kesiapan UMKM melalui kuesioner dan wawancara.

Proses pertama sebelum membuat laporan keuangan yaitu mencatat transaksi. Berikut hasil wawancara dengan pelaku UMKM. UD Abadi Jaya Mebel sudah melakukan pencatatan keuangan. Pencatatan yang dilakukan masih sederhana sebatas untuk melaporkan rincian penggunaan kas. pencatatan keuangan yang dibuat UD Abadi terbagi dalam dua buku yaitu buku penjualan dan buku belanja. Buku penjualan berisi transaksi rincian kas yang dikeluarkan untuk pesanan barang. Buku belanja berisi biaya gaji, pembelian bahan, dan biaya lain-lain. Pencatatan tersebut dilakukan secara rutin. Seperti yang diungkapkan oleh pak Rizki (sekretaris).

“Iya tiap ada penjualan atau beli barang ya dicatat mbak. notanya juga disimpan terus. Nota tahun kemarin-kemarin juga masih ada. Pencatatannya juga rutin kan buat laporan ke pemiliknya, buat dicek. Isi catatannya ya bon karyawan berapa nanti dikurangi sama hasil kerjanya itu ketemu selisih hutang atau piutang karyawan”.

Sedangkan dua UMKM lainnya tidak melakukan pencatatan transaksi apapun. Mereka hanya mengarsipkan nota pembelian dan penjualan. Seperti yang disampaikan bapak Bahrul Ulum, pemilik Mebel Morodadi.

“Nota-nota ini saja mbak yang saya simpen, saya gak pernah nyatet. Nota pas jual barang sama beli kayu ini masih saya simpen buat lihat utang saya, harga kayunya”.

Seperti bapak Bahrul Ulum, Bapak Khusnul sekretaris di UD DJ menyatakan bahwa pada UD DJ tidak pernah ada pencatatan apapun. Beliau hanya mengarsipkan nota penjualan.

“Disini saya gak pernah nyatet mbak, kalo ada pembeli ya dibuatkan nota. Nanti untuk bukti ada penjualan hari ini ya nota itu yang diperiksa sama bos. Kadang yang dikantor bosnya sendiri”.

“Saya buat catetan seperti ini saja mbak buat laporan ke bos. Nanti dicek bosnya uang yang kemarin diberi buat apa aja. Semua dilihat dalam rincian catetan ini. Ndak bikin laporan keuangan mbak”.

UMKM tersebut tidak menyusun laporan keuangan karena alasan tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana menyusun laporan keuangan, karena tidak ada karyawan yang mengetahui tentang akuntansi, usaha milik sendiri. Selain itu dari pemilik usaha tidak meminta untuk membuat laporan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bahrul Ulum, pemilik Mebel Morodadi.

“Saya gak buat laporan keuangan mbak. Saya gak ngerti. Sekolah saya sampai tsanawiyah saja. Ya pokonya saya bisa nentukan harga dengan perkiraan pake nota. biar gak rugi saja”.

Keterangan dari bapak Rizky, sekretaris UD Abadi Jaya Mebel.

“Gak pernah buat laporan keuangan mbak. Catetan ini yang biasanya dilaporkan ke bos buat dicek”.

Selain dari alasan diatas, alasan lainnya yaitu mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi maupun workshop tentang proses penyusunan laporan keuangan. Sehingga mereka kesulitan untuk membuat laporan keuangan, terlebih jika mereka ditanya tentang standar akuntansi mereka lebih tidak tahu lagi.

Keterangan dari bapak Wahyudi, pemilik UD Abadi Jaya Mebel.

“Saya gak buat laporan mbak. Ya karena gak bisa. belum pernah juga mendapatkan pelatihan membuat laporan keuangan. Ya saya catet sederhana saja yang penting saya bisa cek keuangannya”.

Keterangan dari pak Khusnul, UD DJ.

“Gak pernah buat mbak, ya nota ini saja. Kendalanya ya tidak ada karyawan khusus akuntansi, pemiliknya juga tidak ingin buat laporan keuangan. Karena dulu pernah buat laporan keuangan tapi labanya turun-turun lalu karyawan yang bagian keuangan itu keluar. Jadi sekarang udah gak buat laporan lagi. Sosialisasi seperti pelatihan itu pernah ikut tapi sekarang sudah ndak ikut.”

Salah satu dari mereka mengaku pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Perhutani Jombang tentang akuntansi pembelian kayu. Dari dokumen yang ditemukan peneliti, dokumen tersebut berisi rincian kayu yang digunakan untuk produksi. Menurut keterangan pak Bahrul dalam sosialisasi tersebut tidak diajarkan untuk menyusun laporan keuangan. Berikut ini yang pernyataan pak Bahrul Mebel Morodadi.

“Saya tidak tahu laporan keuangan itu bagaimana. Saya ya pernah mendapat sosialisasi dari Dinas Perhutani. Disana diajari buat akuntansi pembelian. Kalo beli kayu saya nyatet di buku ini. Jumlahnya berapa jenis kayunya, panjang, diameter, dan volumenya juga ditulis. Nanti petugas dari perhutani kesini ngecek laporannya”.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Antok yang merupakan perwakilan dari Central of Brozes. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Saya tidak tau kalau ada standar khusus untuk usaha-usaha seperti ini. Kalau jenis laporan keuangan yang sesuai dengan standar juga saya tidak mengetahui apa saja dan bagaimana bentuknya. Belum pernah ada sosialisasi terkait ini sebelumnya, biasanya yang ada itu cuma sosialisasi usaha, bagaimana cara mengelola modal dan bisa memasarkan produk seperti itu, itu pun sudah lama”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Salim. Bapak Salim tidak mengetahui bahwa ada SAK EMKM yang berlaku efektif per 1 Januari 2018 yang dipergunakan untuk UMKM. Beliau pun menuturkan bahwa laporan keuangan itu adalah laporan laba rugi. Beliau menuturkan sebagai berikut:

“Saya tidak tahu kalau ada standar baru buat usaha seperti ini yang berlaku 1 Januari 2018. Kalau ada sosialisasi seperti itu mungkin saya bisa tahu karena saya selalu menghadiri, ini tidak ada dan sekarang pun jarang ada seminar atau apa, kalau dulu sering ada sosialisasi usaha. Laporan keuangan sesuai standar itu yang seperti apa saya pun tidak begitu paham, yang saya tahu laporan itu ya laba rugi. Saya tahu laba rugi, masih ingat waktu sekolah dulu”.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibu Sri Lestari, yaitu sebagai berikut: “Tidak mengetahui ada standar itu dan bagaimana bentuk laporan keuangan yang sesuai standar juga saya tidak tahu. Tidak pernah ada pelatihan akuntansi disini, yang pernah saya ikuti dulu cuma seminar dari Dinas Perdagangan ya bagaimana mengelola usaha seperti itu”.

Dari ketiga responden mengaku bahwa mereka tidak mengetahui adanya SAK EMKM dan tidak pernah ada sosialisasi atau pelatihan yang terkait, maka begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Sutoyo. Bapak Sutoyo menyampaikan sebagai berikut: “Saya tidak tahu ada standar sendiri untuk usaha seperti yang saya miliki. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar juga saya tidak tahu apa saja, kalau dulu pihak bank ya tidak meminta laporan keuangan kalau mau minta pinjaman, cuma ditanya omset berapa dan jaminan seperti itu saja. Sosialisasi sepertinya pernah ada tapi saya tidak tahu sosialisasi apa karena saya juga tidak mengikutinya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat dikatakan bahwa at diketahui bahwa UMKM belum siap untuk menerapkan SAK EMKM. Karena beberapa alasan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaku UMKM di Kabupaen Jombang tidak mengetahui bahwa ada standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan khusus untuk UMKM dan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2018. Para pelaku UMKM ini juga tidak memahami sedikitpun terkait SAK EMKM. Mereka tidak pernah mendengar SAK EMKM dan tidak memahami ketentuan-ketentuan yang ada di dalam SAK EMKM. Keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM dapat dilihat dari beberapa hal berikut ini: a) Para pelaku UMKM tidak melakukan pemisahan antara asset pribadi dan asset usaha; b) Para pelaku UMKM tidak mengetahui laporan keuangan apa saja yang sesuai dengan SAK EMKM; c) Para pelaku UMKM juga tidak mengetahui pos-pos yang ada di dalam setiap laporan keuangan.

3. Manfaat Laporan Keuangan Sebagai Alat Meningkatkan Kinerja.

Laporan keuangan sangat bermanfaat untuk mengetahui kondisi kesehatan suatu usaha. Dengan memanfaatkan laporan keuangan pelaku usaha dapat membuat keputusan-keputusan tepat. Dengan keputusan yang tepat maka keberhasilan suatu usaha dapat ditingkatkan. UMKM di Kabupaten Jombang memiliki ukuran yang berbeda-beda dalam menilai kinerja usaha mereka. Karena sebageian besar tanpa adanya laporan keuangan mereka menilai kinerja hanya dari apa yang mudah diingat saja dengan memanfaatkan bukti transaksi sebagai dokumen pendukung. UD DJ menilai kinerja dari jumlah pesanan barang yang dapat

menunjukkan kenaikan atau penurunan pendapatan. Kinerja UD DJ dianggap baik ketika banyak pesanan. Seperti UD DJ, UD Abadi menilai kinerja usaha dengan melihat banyaknya pesanan, jumlah produksi dan penjualan, serta kemampuan untuk membuka cabang baru. lain halnya dengan UD DJ dan UD Abadi Jaya, Mebel Morodadi menilai kinerja dari seringnya membeli bahan. seringnya membeli bahan menunjukkan jumlah produksi barang lancar dan banyak terjadi penjualan. Penilaian yang kedua yaitu dari jumlah persediaan bahan, apabila stok kayu yang dimiliki banyak menunjukkan keuangan sedang baik karena mampu membeli banyak kayu.

Laporan keuangan disusun dengan proses pertama yaitu pencatatan dan prinsip pemisahan harta perusahaan dengan harta pribadi. Dalam hal ini terdapat perbedaan UMKM yang memanfaatkan informasi yang ada dalam catatan keuangan dan pemisahan harta dengan yang tidak. UD Abadi Jaya Mebel adalah UMKM yang membuat catatan transaksi dengan rutin dan melakukan pemisahan harta. Informasi dalam catatan tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui rincian biaya yang dikeluarkan. Sehingga dapat ditentukan dengan pasti berapa biaya produksi tiap barang. Dengan ketepatan informasi tersebut membuat usaha UD Abadi mengalami keuntungan dan dapat mengembangkan usahanya dengan membuat cabang. Hingga saat ini UD Abadi sudah memiliki 3 cabang. UMKM lainnya kesulitan dalam mengetahui jumlah pendapatan dan laba pasti. Karena hasil usaha tidak difokuskan untuk pengembangan usaha namun laba usaha digunakan untuk keperluan pribadi tanpa ada catatan. Sehingga kemungkinan besar laba usaha digunakan untuk keperluan diluar usaha tanpa diketahui jumlahnya karena tidak ada catatan. Perbedaan selanjutnya yaitu perkembangan usahanya juga tidak sepesat UD Abadi Jaya Mebel.

Dari hasil wawancara dapat diketahui pemanfaatan catatan keuangan dan prinsip pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha sudah menghasilkan perbedaan dengan UMKM lain yang tidak memanfaatkan catatan keuangan. Apalagi jika UMKM sudah menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, sudah pasti akan sangat membantu untuk meningkatkan kinerja usaha mereka.

Hasil penelitian serupa Nasa, I.M. dkk (2012: 213), yang menemukan bahwa UMKM yang melakukan pencatatan keuangan dengan baik memiliki perkembangan usaha yang lebih pesat dibandingkan dengan UMKM lainnya meskipun usia pendiriannya lebih muda. Hal ini menunjukkan bahwa usia perusahaan tidak selalu mempengaruhi kinerja. Namun pencatatan keuangan terbukti sangat bermanfaat bagi suatu usaha untuk meningkatkan kinerjanya. Selain dari pencatatan keuangan pemisahan keuangan juga diperlukan.

Hasil penelitian Nasa, I.M. dkk (2012: 210) menemukan bahwa UMKM yang melakukan pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi mampu berkembang lebih baik dibandingkan UMKM yang tidak melakukan pemisahan keuangan. Karena adanya pemisahan keuangan pada CV Sawoon yang terjadi adalah aset dan modalnya meningkat setiap periode. hal ini menunjukkan bahwa pemisahan keuangan juga penting. Dalam hal ini pengusaha mampu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap keuangan usaha.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan kesiapan UMKM dalam penerapan SAK EMKM untuk menunjang kinerja 16 UMKM di Kabupaten Jombang yang telah dilakukan dapat disimpulkan terdapat ketidaksiapan pelaku UMKM dalam menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM dimana standart akuntansi tersebut baru berjalan diawal tahun 2018, Dan masih banyak para pelaku UMKM yang belum memahami Standart Akuntansi yang ada dalam pembuatan laporan keuangan usahanya. Hanya terdapat 6

UMKM yang membuat pencatatan keuangan terhadap kas keluar dan kas masuk saja tidak membuat kedalam laporan keuangan, hal tersebut membuat pemilik lebih memahami perkembangan usahanya karena dari beberapa ungkapan yang menurut mereka pembuatan laporan keuangan tersebut terlalu rumit. Selain itu kendala yang dialami pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan antara lain kurangnya SDM didalam usahanya, terkendala dibanyaknya biaya yang harus dikeluarkan dalam hal pembuatan laporan keuangan tersebut, dan terlalu rumitnya dalam hal pembuatan laporan keuangan membuat para pelaku UMKM mengambil cara yang sederhana dalam mengelolah usahanya.

Penerapan SAK EMKM dikalangan para pelaku UMKM belum sepenuhnya dilakukan dalam pembuatan laporan keuangan dan sebenarnya peran SAK EMKM dikalangan pelaku UMKM dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja usaha UMKM, namun pelaku UMKM di Kabupaen Jombang belum sama sekali menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Jadi SAK EMKM sendiri belum dapat berperan dalam kinerja usaha UMKM di Kecamatan Peterongan, melainkan pelaku UMKM mengukur kinerja usahanya dari catatan akuntansi yang dibuat menurut pemahaman pemilik UMKM. Saran diberikan pada Dinas Koperasi dan UMKM, hendaknya melakukan pendataan UMKM disetiap tahunnya agar dapat melihat perkembangan UMKM disetiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang, oleh karena itu peran dari Instansi agar menyelenggarakan pelatihan dan workshop kepada para pelaku UMKM mengenai Standart Akuntansi yang dapat membantu perkembangan UMKM-UMKM.

Untuk pelaku UMKM, diharapkan terus dapat meningkatkan wawasan pengetahuan dengan cara selalu mengikuti workshop/pelatihan agar dapat terus membantu meningkatkan perkembangan usahanya dan mewujudkan tujuan dari setiap pemilik usaha. Sedangkan kepada peneliti selanjutnya, hendaknya menambah objek penelitian dengan memperluas jangkauan objek penelitian, atau dapat menjadikan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai tambahan objeknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Eli. 2016. Pengembangan Industri Kecil Kerajinan Manik-Manik (Studi Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Public*. Vol 4, No.11.
- Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (Studi Kasus UD. Multi Mulia Megah, Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- Ediraras, Dharma T. 2010. Akuntansi dan Kinerja UKM. *Jurnal Ekonomi Bisnis*. No. 2, Volume 15.
- Hanum, Zulia. 2013. Pengaruh Persepsi Pengusaha Kecil Atas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Keberhasilan Perusahaan (Survei Pada Usaha-
- Hartini, Sri. 2012. Peran Inovasi: Pengembangan Kualitas Produk dan Kinerja Bisnis. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. Vol.14, No. 1, Hal: 82-88
- Jusup, Al. Haryono. 2011. Dasar-dasar Akuntansi. Jilid 1. Edisi ke-7. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta.
- Musmini, Lucy Sri. 2013. Sistem Informasi Akuntansi Untuk Menunjang
- Notohatmodjo, Tegar Satriyo. 2014. Evaluasi Terhadap Sistem Pencatatan Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di Kota Semarang).
- Pemberdayaan Pengelolaan Usaha Kecil (Studi Kasus Pada Rumah Makan Taliwang Singaraja). *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 2, No. 1, ISSN 2337-537X.

- Putra, Hermon Adhy. 2012. Penyusunan Laporan Keuangan Untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di UMKM Kelurahan Mojosoong Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Rokhayati, Isnaeni. 2011. Pengukuran Kinerja Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Suatu Telaah Pustaka. Hal 94-100.
- Sariningtyas, Pratiwi dan Tituk Diah W. 2011. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Usaha Kecil dan Menengah. Vol. 1, No. 1, Hal. 90-101.
- Senoaji, Aditya Rizqi. 2014. Gap Analysis Penerapan SAK ETAP Pada Penyusunan Laporan Keuangan Ukm Di Kabupaten Kudus (Studi Pada Ukm Padurenan Jaya). Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sudaryanto, Ragimun dan Rahma Rina Wijayanti. Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : CV Alfabeta.
- Susanto, Edi. 2011. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di UMKM Kelurahan Mojosoong Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Tri, Dani Danuar. 2013. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang. Skripsi. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Usaha Kecil Di Kota Medan). Jurnal Riset Akuntansi Bisnis. ISSN :1693-7597.